

I. DASAR HUKUM

Salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini bersifat informatif yang memuat tentang pelaksanaan berbagai kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Muatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah sebagaimana amanat Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun urusan pemerintahan tersebut meliputi penyelenggaraan urusan desentralisasi (urusan pilihan dan urusan wajib), Tugas Pembantuan dan pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan di daerah.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017, merujuk pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2008 Nomor 007 Seri E Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0016);
12. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018(Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0070);

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Kondisi Geografis Daerah

1. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649). Selain itu, ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sehingga di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuklah 12 Daerah Tingkat II, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Barat dan Sumba Timur.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Negara Australia;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Setelah 59 tahun perjalanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat serta perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, maka sejak tahun 1996 hingga akhir tahun 2013, di Provinsi NTT telah ditetapkan 10 (sepuluh) daerah otonom baru (Kabupaten/Kota), yaitu:

- a. Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

- b. Kabupaten Lembata dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Kabupaten Rote Ndao dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
- d. Kabupaten Manggarai Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
- e. Kabupaten Nagekeo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
- f. Kabupaten Sumba Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
- g. Kabupaten Sumba Barat Daya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);

- h. Kabupaten Manggarai Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4752);
- i. Kabupaten Sabu Raijua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4752).
- j. Kabupaten Malaka yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 5396).

Secara administrasi pemerintahan sampai dengan keadaan Bulan Desember Tahun 2017, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota, 309 Kecamatan, 327 Kelurahan dan 3.026 Desa. Rincian wilayah administratif selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel. 1.1
Jumlah Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Luas wilayah
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2017

Kab/Kota	Desa	Kelurahan	Kecamatan	Luas wil. (km2)
Sumba Barat	63	11	6	2.183,18
Sumba Timur	140	16	22	7.000,50
Kupang	160	17	24	5.434,76
TTS	266	12	32	3.947,00
TTU	160	33	24	2.669,70
Belu	69	12	12	1.284,97
Alor	158	17	17	2.864,60
Lembata	144	7	9	1.266,00
Flores Timur	229	21	19	1.813,20
Sikka	147	13	21	1.731,90
Ende	255	23	21	2.046,50
Ngada	135	16	12	1.645,88
Manggarai	145	26	12	2.000,44
Rote Ndao	112	7	10	1.280,00
Manggarai Barat	164	5	12	2.397,83
Sumba Tengah	68	-	5	1.868,79
Sumba Barat Daya	173	2	11	1.480,46
Nagekeo	97	16	7	1.416,96
Manggarai Timur	159	17	9	2.642,93
Sabu Raijua	58	5	6	460,59
Malaka	127	-	12	1.160,63
Kota Kupang	-	51	6	26,18
NTT	3.026	327	309	48.718,10

Sumber: Ditjen BAK Kemendagri, Tahun 2018.

Seiring dengan perkembangan paradigma pemerintahan dan tuntutan akan pelayanan pemerintahan serta aspirasi masyarakat di Nusa Tenggara Timur, telah diusulkan kepada Pemerintah Pusat pemekaran 8 (delapan) Calon Daerah Persiapan (CDP) otonom baru yaitu, CDP Kabupaten Adonara di Kabupaten Flores Timur, CDP Kota Maumere di Kabupaten Sikka, CDP Kabupaten Pantar di Kabupaten Alor, CDP Kabupaten Amfoang di Kabupaten Kupang, CDP Kabupaten Amanatun di Kabupaten Timor Tengah Selatan serta CDP Kabupaten Pahunga Lodu, CDP Kabupaten Sumba Selatan dan CDP Kabupaten Sumba Timur Jaya di Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan 1 (satu) CDP Otonom Baru Kabupaten Manggarai Barat Daya di Kabupaten Manggarai Barat, saat ini sedang berproses di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kedelapan calon daerah persiapan otonom baru yang telah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kementerian Dalam Negeri, kondisi perkembangan terakhirnya yakni, proses penetapan calon daerah-daerah persiapan otonom baru tersebut masih menunggu diterbitkannya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) sebagai dasar atau payung hukum bagi pembentukan dan kuota CDP untuk menjadi daerah otonom baru.

2. Topografis

Sebagian besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada rentang ketinggian 0 – 1.000 meter di atas permukaan laut dengan luas 86,35% dan sedangkan sebagian kecil atau 3,65% wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada ketinggian >1.000 m di atas permukaan laut. Keadaan topografis Nusa Tenggara Timur berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadis pada gugusan yang sempit. Pada semua pulau dominan permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, dataran-dataran yang sempit memanjang mengikuti garis pantai, diapit dataran tinggi atau perbukitan. Lahan dengan kemiringan 0 – 15 persen seluas 26,47 % , lahan dengan kemiringan >15 – 40 persen mencapai 38,07 % dan lahan dengan kemiringan >40 persen mencapai 35,46 %.

Keadaan topografis Nusa Tenggara Timur berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadis pada gugusan yang sempit. Pada semua pulau dominan permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, dataran-dataran yang sempit memanjang mengikuti garis pantai, diapit dataran tinggi atau perbukitan. Kondisi geomorfologis yang demikian menyebabkan pertanian pada dataran sangat terbatas baik pertanian basah maupun lahan kering. Pertanian lahan kering banyak dilakukan pada daerah-daerah dengan kemiringan yang curam sehingga produktivitas menjadi rendah. Memiliki sebanyak 40 sungai dengan panjang berkisar antara ± 25 s/d 118 km. Di Daratan Flores dan Daratan Alor terdapat 11 gunung berapi dengan ketinggian berkisar antara ± 637 s/d 2.149 m di atas permukaan laut, yang sejak Tahun 1881 sampai dengan Tahun 2004 tercatat semua gunung berapi yang ada pernah mengalami letusan.

3. Geologi

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan circum-pasifik. Pulau-pulau seperti Pulau Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau sekitarnya terbentuk secara vulkanik dan sering terjadi patahan. Sedangkan pulau Sumba, Sabu, Rote, Semau, Timor, dan pulau sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Dengan kondisi ini maka jalur pulau-pulau yang terletak pada jalur vulkanik dapat dikategorikan daerah dengan kondisi tanah yang subur namun labil dan berpotensi untuk terjadi bencana alam.

Di Provinsi NTT, terdapat berbagai deposit tambang, baik mineral maupun sumber-sumber energi lainnya, seperti: Pasir Besi (Fe), Mangan (Mn), Emas (Au), Flourspor (Fs), Barit (Ba), Belerang (S), Posfat (Po), Zeolit (Z), Batu Permata (Gs), Pasir Kwarsa (Ps), Pasir (Ps), Gypsum (Ch), Batu Marmer (Mr), Batu Gamping, Granit (Gr), Andesit (An), Balsitis, Pasir Batu (Pa), Batu apung (Pu), Tanah Diatomea (Td) Lempung/Clay (Td).

Sedangkan struktur batuan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari:

- a. Batuan Silicic (acid) Rock (batuan berasam kersi asam), terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, sebagian besar Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, sebagian besar

Kabupaten Ngada, sebagian Kabupaten Manggarai, sebagian besar Manggarai Barat dan sebagian kecil Kabupaten Kupang;

- b. Batuan Matic Basic Rocks (batuan basa);
- c. Batuan Intermediate Basic (basa menengah);
- d. Batuan Pre Tertiare Undivideo (pra tersier tak dibedakan);
- e. Batuan Paleogene (pleogen);
- f. Alluvial Terrace Deposit and Coral Reets (alluvium undak dan berumba koral);
- g. Batuan Neogene (neogen);
- h. Batuan Kekneno Series (deret kekneno);
- i. Batuan Sonebait Series (deret sonebait);
- j. Batuan Sonebait and Ofu Series Terefolde (deret sonebait dan deret terlipat bersama);
- k. Batuan Ofu Series (deret ofu);
- l. Batuan Silicic Efusives (efusiva berasam kersik);
- m. Batuan Triassic (trias) dan Batuan Crystalline Shist (sekis hablur).

4. Iklim

Keadaan iklim di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal dengan 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada Bulan Juni–September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember-Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan.

Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – Nopember walaupun demikian mengingat Nusa Tenggara Timur dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera pasifik sampai di wilayah NTT kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hujan di wilayah ini berkurang. Hal inilah yang menjadikan Provinsi ini sebagai wilayah yang tergolong kering dimana hanya 4 (empat) bulan (Desember s/d Maret) yang keadaannya relatif basah dan 8 (delapan) bulan sisanya relatif kering, dengan suhu udara rata-rata maksimum 30 sampai 36 derajat celcius dan suhu minimum 21 derajat celcius sampai 24,5 derajat celcius, serta

curah hujan rata-rata 1.164 mm/tahun yang berbeda pada tiap daerah, yaitu: Wilayah Flores bagian barat, meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Ngada merupakan daerah yang cukup basah, karena curah hujan rata-ratanya lebih tinggi dari rata-rata total yaitu 3.849 mm/tahun, sehingga sangat cocok untuk pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan yang berumur pendek.

B. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur yang terdata Tahun 2017 sebanyak 5.367.720 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 66.961 jiwa (1,26%) dari tahun 2016 yaitu sebanyak 5.300.759 jiwa. Bila dilihat dari penyebaran penduduk per Kabupaten/Kota terhadap total penduduk Nusa Tenggara Timur, maka jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 464.141 jiwa (8,65%), disusul Kota Kupang 433.886 jiwa (8,08%) dan Kabupaten Kupang sebanyak 404.237 jiwa (7,53%). Sedangkan Kabupaten dengan persentase jumlah penduduk terendah pada tahun 2017, yakni Kabupaten Sumba Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 85.795 jiwa (1,60%). Namun secara faktual jumlah penduduk di Nusa Tenggara Timur yang belum terdata masih cukup besar, karena berdasarkan data pelayanan yang ada, jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur tahun 2017 telah mencapai angka 5,60 juta jiwa lebih. Untuk itu, Pemerintah Provinsi senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan perekaman data kependudukan terutama pada daerah-daerah yang terpencil dan terisolir, termasuk ketersediaan dan kelayakan peralatan perekaman/penunjang lainnya. Secara rinci jumlah penduduk per Kabupaten/Kota Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2. Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Persentase
1	2	3	4	5	6
1.	Kabupaten Kupang	404.237	206.075	198.162	7,53
2.	Timor Tengah Selatan	464.141	230.303	233.838	8,65
3.	Timor Tengah Utara	262.885	132.548	130.337	4,90
4.	Belu	221.525	111.929	109.596	4,13
5.	Alor	210.699	104.577	106.122	3,93
6.	Flores Timur	279.595	136.582	143.013	5,21

1	2	3	4	5	
7.	Sikka	314.927	152.634	162.293	5,87
8.	Ende	270.047	132.878	137.169	5,03
9.	Ngada	165.241	81.638	83.603	3,08
10.	Manggarai	318.952	159.751	159.201	5,94
11.	Sumba Timur	237.677	122.502	115.175	4,43
12.	Sumba Barat	145.885	74.904	70.981	2,72
13.	Lembata	135.026	64.689	70.337	2,52
14.	Rote Ndao	144.345	72.465	71.880	2,69
15.	Manggarai Barat	256.794	129.181	127.613	4,78
16.	Nagekeo	160.776	79.457	81.319	3,00
17.	Sumba Tengah	85.795	43.932	41.863	1,60
18.	Sumba Barat Daya	307.881	159.313	148.568	5,74
19.	Manggarai Timur	262.926	133.731	129.195	4,90
20.	Sabu Raijua	93.504	47.711	45.793	1,74
21.	Malaka	190.976	96.303	94.673	3,56
22.	Kota Kupang	433.886	220.671	213.215	8,08
	NTT	5.367.720	2.693.774	2.673.946	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

2. Angkatan Kerja

Berdasarkan data BPS (NTT Dalam Angka Tahun 2017), penyerapan tenaga kerja menurut sektor tahun 2016 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan, paling banyak menyerap tenaga kerja sebanyak 1.214.060 orang (53,32%) dari total jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan kerja utama sebesar 2.277.068 orang, kemudian berturut-turut disusul oleh sektor jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan sebanyak 373.848 orang (16,42%); sektor perdagangan besar dan eceran, rumah makan sebanyak 231.989 orang (10,19%); sektor industri pengolahan sebanyak 167.476 orang (7,35%); sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi sebanyak 126.833 orang (5,57%); dan sektor bangunan sebanyak 103.451 orang (4,54%).

Bila dibandingkan dengan tahun 2015, sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 154.236 orang (11,27%). Hal ini disebabkan karena pada musim kemarau, dimana sebagian lahan pertanian tidak dapat digarap, maka sebagian tenaga kerja dari sektor pertanian beralih profesi ke sektor-sektor lainnya yakni ke sektor konstruksi dan sektor jasa-jasa, namun pada umumnya hanya sebagai tenaga informal. Adapun jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 – 2016

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas per Tahun			
		2015	%	2016	%
1.	Pertanian, kehutanan, Perkebunan & Perikanan	1.368.296	61,65	1.214.060	53,32
2.	Pertambangan dan Penggalian	18.435	0,83	29.251	1,28
3.	Industri Pengolahan	136.766	6,16	167.476	7,35
4.	Listrik, Gas & Air	3.537	0,16	9.354	0,41
5.	Bangunan	74.754	3,37	103.451	4,54
6.	Perdagangan Besar dan Eceran, Rumah Makan	189.109	8,52	231.989	10,19
7.	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	105.091	4,74	126.833	5,57
8.	Keuangan Asuransi, Usaha Persewaan & Bangunan, Tanah & Jasa Perusahaan	29.180	1,31	20.806	0,91
9.	Jasa Kemasy. Sosial & Perorangan	294.123	13,25	373.848	16,42
	Jumlah	2.219.291	100	2.277.068	100

Sumber : BPS – NTT Dalam Angka 2017

Apabila diperdalam per masing-masing kabupaten/Kota, berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan NTT (KEKR NTT, Februari 2018) bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sektor pertanian dan administrasi pemerintah terlihat sangat besar. Tingginya ketergantungan terlihat dari pangsa dua sektor tersebut yang mencapai di atas 50% pada 13 kabupaten/kota, kecuali Kota Kupang, Belu, Sumba Timur, Ende dan Manggarai yang pangsa kedua sektor tersebut kurang dari 40%. Hal ini berarti tingkat ketergantungan terhadap sektor primer atau peran pemerintah sangat besar dalam menggerakkan perekonomian.

3. Kondisi Ketenagakerjaan

Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan NTT (KEKR NTT, Februari 2018), jumlah pengangguran di NTT pada bulan Agustus 2017 sebesar 3,27% dari total angkatan kerja, lebih baik dibanding pengangguran terbuka nasional yang sebesar 5,50%. Dari sisi jumlah angkatan kerja dan pengangguran, terjadi penurunan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2017 yaitu menjadi sebanyak 2.398.609 orang dari bulan Februari sebesar 2.503.057 orang. Penurunan tersebut terutama didorong oleh adanya penurunan yang cukup signifikan pada kategori pegawai kerja sebesar 102.748 jiwa. Dari sisi pengangguran jika dibandingkan, terjadi penurunan jumlah dari 80.248 orang pada Februari 2017 menjadi 78.548 orang pada Agustus 2017.

Penurunan sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan konstruksi.

Apabila dilihat dari struktur pekerjaan di NTT, terlihat bahwa semua kelompok usia didominasi oleh pekerjaan informal. 79% pekerja berada di pedesaan dan lebih dari 50% berpendidikan SD dan terkonsentrasi di pedesaan. NTT juga memiliki rata-rata pekerja dengan pendidikan terendah ketiga setelah Provinsi Papua dan Jawa Tengah. 56,2% pekerja memiliki latar belakang pendidikan hanya sekolah dasar, sedikit lebih baik dari Papua yang sebesar 57,2%.

Walaupun angka pengangguran terbuka di NTT relatif rendah, namun permasalahan utama ketenagakerjaan di NTT adalah pada kualitas pekerjaan yang rendah, meliputi terlalu banyaknya pekerjaan sektor informal dan pekerjaan utama berupa pekerja keluarga tidak dibayar ataupun buruh tidak tetap dengan sebagian besar pekerja memperoleh gaji yang rendah atau bahkan tidak memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme padat karya, seperti salah satunya melalui pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011.

III. PENDIDIKAN

Pendidikan memegang peranan strategis dalam meningkatkan mutu dan karakter sumber daya manusia. Untuk mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berpendidikan dan berkarakter tersebut, maka pemerintah menyelenggarakan pembangunan di bidang pendidikan melalui jalur formal, nonformal dan informal sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, termasuk melibatkan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senantiasa mengoptimalkan pencapaian standar pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan.

A. Angka Melek Huruf

Salah satu indikator yang dapat mengukur capaian di bidang pendidikan adalah Angka Melek Huruf (AMH) atau kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis. Semakin tinggi nilai AMH di suatu wilayah mengindikasikan semakin baiknya mutu serta kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Peningkatan AMH selalu sejalan dengan penurunan angka buta huruf, apabila AMH meningkat maka secara tidak langsung menggambarkan

bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam menyerap informasi, meningkatkan intelektualitas pribadi serta berkomunikasi secara tertulis. Adapun persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang melek huruf di Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut.

Tabel1.4. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2011-2016

Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Total (%)
2011	91,00	87,49	89,20
2012	91,81	88,84	90,30
2013	92,99	90,29	91,61
2014	88,92	83,92	86,52
2015	93,89	91,61	92,73
2016	93,93	91,31	92,60

Sumber Data : BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2017, 2018

Berdasarkan data BPS, NTT dalam angka, AMH penduduk NTT dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, kecuali persentase AMH perempuan yang terkoreksi sedikit mengalami penurunan seperti yang terlihat pada Tabel 1.4. AMH laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan AMH perempuan. Salah satu penyebabnya yakni masih adanya kebiasaan dalam masyarakat untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada anak/kaum laki-laki untuk bersekolah atau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak/kaum perempuan.

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut (SD/MI=7-12 tahun, SMP/MTs=13-15 tahun dan SMA/MAN=16-18 tahun).

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan, atau dapat dikatakan bahwa APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Sejak tahun 2007, di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan dalam perhitungan nilai APK. Perkembangan APK berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5.
Angka Partisipasi Kasar (APK) per Tingkat Pendidikan
Di Provinsi NTT, Tahun 2013-2017

No	Jenjang pendidikan	Nilai APK (% per Tahun)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	114,8	119,65	116,46	112,85	118,59
2	SMP/MTs	96,87	96,91	91,25	98,96	98,93
3	SMA/MAN	76,83	77,01	82,74	77,69	83,20

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi NTT, 2018

Sesuai tabel 1.5, dapat dilihat bahwa sejak periode tahun 2013-2017 besarnya nilai APK untuk tiap jenjang pendidikan menunjukkan pola yang cenderung sama. Untuk jenjang pendidikan SD/MI, data APK yang ada cenderung meningkat dan berada di atas 100%, hal ini menandakan bahwa untuk jenjang SD/MI masih banyak yang murid yang bersekolah lebih awal dan/atau melalui pendidikan non formal. Namun untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MAN belum semua anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan menengah dan atas yang bersekolah, namun demikian data yang ada menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

C. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah dari seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Dengan demikian APM merupakan indikator untuk mengukur jumlah anak yang bersekolah tepat waktu atau pada usia yang tepat.

Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 1.6.

Tabel 1.6
Kondisi APM per Tingkat Pendidikan
Di Provinsi NTT, Tahun 2013-2017

No	Jenjang pendidikan	Nilai APM(% per Tahun)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI/SDLB	97,10	97,80	98,00	98,49	98,93
2.	SMP/MTs/SMPLB	83,60	83,87	83,95	84,20	84,44
3.	SMA/SMK/MAN	73,03	73,51	73,90	74,47	74,59

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi NTT, 2018

Tabel 1.6, di atas dapat dilihat bahwa kondisi APM Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menunjukkan pola yang sama, dimana semakin meningkat jenjang pendidikan maka daya serap atau partisipasi murid yang sesuai

dengan umurnya semakin menurun. Namun bila dilihat dari perkembangannya tiap jenjang pendidikan, maka APM menunjukkan pola yang sedikit meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017 persentase APM jenjang SD/MI/SDLB sebesar 98,93% atau meningkat sebelumnya sebesar 98,49. Sedangkan APM untuk jenjang pendidikan selanjutnya walaupun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun persentasenya masih berkisar pada SMP/MTs/SMPLB sebesar 84,44% dan SMA/MA/SMK sebesar 74,59%.

D. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Berdasarkan data BPS (Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2017) persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi penduduk yang ditamatkan di Provinsi NTT Tahun 2016, yakni tidak memiliki ijazah 33,30%, tamat SD 35,77%, tamat SMP 9,06%, tamat SMA 13,75%, tamat SMK 1,81%. Bila dibandingkan dari 21 Kabupaten lainnya, Kota Kupang memiliki tingkat pendidikan penduduk lebih baik dengan proporsi penduduk tidak berijazah terkecil yaitu 9,46%, dan proporsi penduduk terbesar yang menamatkan pendidikan SMA sebesar 35,14% serta tamat SMK 5,06%. Data Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi NTT Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1.7.

Tabel 1.7
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi NTT Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Tidak Punya Ijazah	Tamat SD	Tamat SMTP	Tamat SMU	Tamat SMK
1	2	3	4	5	6	7
1	Sumba Barat	41,73	29,07	9,49	14,10	1,52
2	Sumba Timur	41,01	29,03	9,56	11,00	2,80
3	Kupang	31,13	36,19	11,04	13,85	2,26
4	TTS	38,80	34,99	8,88	12,31	1,03
5	TTU	30,51	40,57	7,73	12,13	1,66
6	Belu	34,87	35,32	9,56	13,28	1,30
7	Alor	30,33	40,29	8,95	12,22	2,52
8	Lembata	28,64	39,83	8,36	11,55	2,15
9	Flores Timur	34,72	36,67	9,88	11,85	2,52
10	Sikka	42,42	28,74	8,73	11,87	1,67
11	Ende	34,81	30,77	9,81	13,36	3,24
12	Ngada	22,15	48,68	7,86	12,23	2,14
13	Manggarai	33,15	38,78	8,79	12,20	0,57
14	Rote Ndao	34,24	38,43	6,81	14,16	0,87
15	Manggarai Barat	31,90	50,95	6,17	7,20	0,35
16	Sumba Tengah	40,11	33,33	8,22	12,79	1,86
17	Sumba Barat Daya	49,87	27,94	8,58	10,64	0,29

1	2	3	4	5	6	7
18	Nagekeo	29,82	40,08	9,29	11,78	2,00
19	Manggarai Timur	28,70	53,52	6,80	6,51	0,60
20	Sabu Raijua	38,22	36,22	10,37	11,41	0,52
21	Malaka	39,53	31,59	8,54	14,86	0,35
22	Kota Kupang	9,46	22,44	12,23	35,14	5,06
Jumlah		33,30	35,77	9,06	13,75	1,81

Sumber : BPS, Provinsi NTT Dalam Angka, 2018

E. Tingkat Kelulusan

Tingkat kelulusan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian pembangunan bidang pendidikan. Tingkat kelulusan per jenjang pendidikan pada Tahun Pelajaran 2015/2016 di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan hasil yang menggembirakan. Data selengkapnya tentang jumlah kelulusan dapat dilihat pada Tabel 1.8. berikut:

Tabel 1.8.
Data Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun Pelajaran 2016-2017

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah				
		Peserta	Lulus	%	Tidak Lulus	%
I. Tahun 2016						
1	SD/MI/SDLB	121.212	121.212	100,00	0	0,00
2	SMP/MTs/SMPLB	100.430	100.430	100,00	0	0,00
3	SMA/MA	52.099	52.099	100,00	0	0,00
4	SMK	16.746	16.746	100,00	0	0,00
II. Tahun 2017						
1	SD/MI/SDLB	124.788	124.788	100,00	0	0,00
2	SMP/MTs/SMPLB	103.763	103.763	100,00	0	0,00
3	SMA/MA	51.821	51.821	100,00	0	0,00
4	SMK	17.535	17.535	100,00	0	0,00

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi NTT, 2018.

Pada tabel 1.8. di atas, terlihat bahwa tingkat kelulusan pada semua jenjang pendidikan mencapai 100% dengan peserta yang mengalami peningkatan untuk hampir semua jenjang pendidikan, kecuali jenjang pendidikan SMA/MA yang sedikit menurun namun meningkat untuk SMK, hal ini menggambarkan bahwa minat masyarakat/murid untuk bersekolah di SMK semakin meningkat. Pencapaian jumlah kelulusan ini merupakan hasil yang menggembirakan, namun Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya bersama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan standar pendidikan di NTT, terutama melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang terpencil, karena penentuan kelulusan siswa berdasarkan pada hasil ujian sekolah.

F. Kondisi Ruang Kelas

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tahun 2016 dan 2017, data kondisi ruang kelas tiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.9. berikut.

Tabel 1.9.
Data Kondisi Ruang Kelas PerJenjang Pendidikan
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2017

Jenjang Pendidikan	Jumlah dan Kondisi Sekolah (unit)					Jumlah Total (unit)
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	
Tahun 2016						
SD	6.295	19.356	4.191	3.945	4.449	38.236
SMP	2.651	6.069	1.035	911	889	11.555
SMA	1.682	2.865	341	242	-	5.130
SMK	1.084	1.059	184	131	-	2.458
Tahun 2017						
SD	6.484	19.692	4.571	4.053	3.755	38.555
SMP	2.738	6.458	1.067	987	819	12.069
SMA	2.070	3.040	314	293	279	5.996
SMK	1.285	1.378	149	72	103	2.987

Sumber data : Survey Dapodik Dinas Pendidikan Provinsi NTT, 2018

Data kerusakan sekolah berdasarkan survey Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dasar dan menengah yang dilakukan oleh Operator Sekolah sehingga perlu data pembanding agar data kerusakannya valid.

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah ruang kelas di Nusa Tenggara Timur untuk masing-masing jenjang pendidikan tahun 2017 yakni 38.555 unit SD, 12.069 unit SMP, 5.996 unit SMA dan 2.987 unit SMK. Sesuai data Dapodik tahun 2017, persentase jumlah ruang kelas yang baik masing-masing sebesar 6.484 unit (16,82%) SD, 2.738 unit (22,69%) SMP, 2.070 unit (34,52%) SMA dan 1.285 unit (43,02%) SMK. Namun demikian data kerusakan sekolah ini berdasarkan survey Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dasar dan Menengah yang dilakukan oleh Operator Sekolah, sehingga untuk kevalidannya perlu dilakukan survey lanjutan yang melibatkan tenaga teknis yang profesional.

G. Rasio Sekolah dan Siswa

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur rasio sekolah terhadap siswa tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.10 berikut.

Tabel 1.10. Rasio Sekolah Terhadap Siswa per Jenjang Pendidikan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI	1:178	1:168	1:165	1:165	1:153
SMP/MTs	1:203	1:212	1:207	1:208	1:204
SMA	1:403	1:370	1:331	1:330	1:355
SMK	1:328	1:257	1:247	1:297	1:283

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan data di atas, rasio sekolah terhadap siswa bila diurutkan berdasarkan besarnya pada tiap jenjang pendidikan, yaitu SMA sebesar 1:355, SMK sebesar 1:283, SMP sebesar 1:204 dan SD sebesar 1:153. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas ketersediaan sekolah sudah memenuhi kebutuhan murid akan sekolah. Namun demikian untuk menyelaraskan rasio jumlah siswa per sekolah, diperlukan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) khusus SMK (Revitalisasi).

IV. KESEHATAN

Status kesehatan masyarakat hanya ditentukan oleh bidang kesehatan sebesar 30%, sedangkan sisanya ditentukan oleh determinan penting di luar kendali bidang kesehatan seperti faktor lingkungan sebesar 40%, faktor keturunan sebesar 20% dan faktor perilaku sebesar 10%.

Untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi NTT dapat disajikan dalam beberapa indikator berikut

A. Kasus Kematian Bayi

Kasus kematian Bayi di Provinsi NTT menunjukkan tren penurunan yang cukup baik. Rincian kasus kematian bayi pada tahun 2016 dan 2017 menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 1.11. berikut.

Tabel 1.11
Jumlah Kasus Kematian Bayi Dari 2016-2017 Menurut Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	KEMATIAN BAYI (Jiwa/Tahun)	
		2016	2017
1	2	3	4
1.	Kota Kupang	17	19
2.	Kabupaten Kupang	66	73
3.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	92	62
4.	Kabupaten Timor Tengah Utara	71	80
5.	Kabupaten Belu	64	39
6.	Kabupaten Alor	26	21
7.	Kabupaten Lembata	32	29

1	2	3	4
8.	Kabupaten Flores Timur	82	31
9.	Kabupaten Sikka	80	54
10.	Kabupaten Ende	63	59
11.	Kabupaten Nagekeo	43	38
12.	Kabupaten Ngada	30	19
13.	Kabupaten Manggarai Timur	59	42
14.	Kabupaten Manggarai	70	55
15.	Kabupaten Manggarai Barat	63	55
16.	Kabupaten Sumba Barat Daya	53	37
17.	Kabupaten Sumba Barat	28	25
18.	Kabupaten Sumba Timur	62	43
19.	Kabupaten Rote Ndao	29	27
20.	Kabupaten Sabu Raijua	30	12
21.	Kabupaten Malaka	24	13
	Jumlah	1.088	874

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 2018

Kasus kematian bayi pada tahun 2017 sebanyak 874 kasus, turun 214 kasus dari keadaan tahun 2016 sebanyak 1.088 kasus. Kasus kematian bayi tertinggi ada di Kabupaten TTU (80 kasus), Kabupaten Kupang (73 kasus) dan Kabupaten TTS (62 kasus), sedangkan kasus kematian bayi terendah ada di Kabupaten Sabu Raijua (12 kasus), Kabupaten Malaka (13 kasus) dan Kota Kupang dan Kabupaten Ngada (19 kasus). Pada tahun 2017 ada 4 Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan kasus kematian bayi, yaitu Kabupaten TTU (bertambah 9 kasus), Kabupaten Kupang (bertambah 7 kasus), Kabupaten Sumba Tengah (bertambah 5 kasus) dan Kota Kupang (bertambah 2 kasus), sedangkan 18 Kabupaten lainnya mengalami penurunan. Penurunan paling tinggi adalah Kabupaten Flores Timur yang berhasil melakukan penurunan kasus kematian bayi sebanyak 51 kasus.

B. Kasus Kematian Ibu (AKI)

Penurunan Kasus Kematian Ibu merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Kasus kematian ibu mengacu pada jumlah kematian ibu terkait proses kehamilan, persalinan dan nifas.

Kasus Kematian Ibu di NTT pada tahun 2016 dan 2017 yang dirinci per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 1.12 berikut.

Tabel 1.12 Rincian Kasus Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota di NTT

NO	KABUPATEN/KOTA	KEMATIAN IBU (Jiwa/Tahun)	
		2016	2017
1	2	3	4
1.	Kota Kupang	4	4
2.	Kabupaten Kupang	13	10
3.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	27	32
4.	Kabupaten Timor Tengah Utara	7	2

1	2	3	4
5.	Kabupaten Belu	5	6
6.	Kabupaten Alor	14	10
7.	Kabupaten Lembata	4	3
8.	Kabupaten Flores Timur	6	4
9.	Kabupaten Sikka	13	4
10.	Kabupaten Ende	12	10
11.	Kabupaten Nagekeo	4	5
12.	Kabupaten Ngada	6	1
13.	Kabupaten Manggarai Timur	10	10
14.	Kabupaten Manggarai	7	5
15.	Kabupaten Manggarai Barat	12	14
16.	Kabupaten Sumba Barat Daya	7	16
17.	Kabupaten Sumba Barat	0	1
18.	Kabupaten Sumba Tengah	2	2
19.	Kabupaten Sumba Timur	11	9
20.	Kabupaten Rote Ndao	7	3
21.	Kabupaten Sabu Raijua	7	7
22.	Kabupaten Malaka	4	4
	Jumlah	182	162

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 2018

Kasus kematian ibu pada tahun 2017 sebanyak 162 kasus, turun 20 kasus dari keadaan tahun 2016 sebanyak 182 kasus. Kasus kematian ibu tertinggi ada di Kabupaten TTS (32 kasus), Kabupaten Sumba Barat Daya (16 kasus) dan Kabupaten Manggarai Barat (14 kasus), sedangkan kasus kematian ibu terendah ada di Kabupaten Ngada dan Sumba Barat (1 kasus), Kabupaten TTU (2 kasus) dan Kabupaten Lembata dan Rote Ndao (3 kasus). Pada tahun 2017 ada 6 Kabupaten yang mengalami peningkatan kasus kematian ibu, yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya (bertambah 9 kasus), Kabupaten TTS (bertambah 5 kasus), Kabupaten Manggarai Barat (bertambah 2 kasus) dan Kabupaten Belu, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sumba Barat (bertambah 1 kasus), sedangkan 16 Kabupaten lainnya mengalami penurunan atau sama dengan keadaan tahun 2016. Penurunan paling tinggi adalah Kabupaten Sikka yang berhasil melakukan penurunan kasus kematian ibu sebanyak 9 kasus.

C. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Indikator lainnya yang menggambarkan kondisi pembangunan kesehatan yakni angka kelangsungan hidup bayi. Kondisi perkembangan kelahiran bayi lahir hidup dan lahir mati tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.13.

Tabel 1.13.
Kondisi Bayi Lahir Hidup/Mati Kabupaten/Kota Tahun 2017

NO	Kab/Kota	Kelahiran		
		Lahir Hidup	Lahir Mati	Jumlah
1.	Sumba Barat	8.024	34	8.058
2.	Sumba Timur	5.933	112	6.045
3.	Kupang	8.443	112	8.555
4.	TTS	5.045	98	5.143
5.	TTU	4.551	85	4.636
6.	Belu	3.711	11	3.722
7.	Alor	2.113	11	2.124
8.	Lembata	3.690	80	3.770
9.	Flores Timur	4.749	64	4.813
10.	Sikka	4.157	75	4.232
11.	Ende	2.472	20	2.492
12.	Ngada	1.867	23	1.890
13.	Manggarai	5.273	106	5.379
14.	Rote Ndao	6.023	84	6.107
15.	Manggarai Barat	4.514	80	4.594
16.	Sumba Tengah	5.389	12	5.401
17.	Sumba Barat Daya	1.420	18	1.438
18.	Nagekeo	1.775	20	1.795
19.	Manggarai Timur	4.634	101	4.735
20.	Sabu Raijua	2.335	52	2.387
21.	Kota Kupang	1.523	15	1.538
22.	Malaka	1.790	7	1.797
	Jumlah/Total	89.431	1.220	90.651

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 2018

Jumlah kelahiran di Provinsi NTT pada tahun 2017 sebanyak 90.651 kelahiran, dimana bayi lahir hidup sebanyak 89.431 atau 98,65% dan bayi lahir mati sebanyak 1.220 atau 1,35%. Jumlah kelahiran dan bayi lahir hidup terbanyak ada di Kabupaten TTS (8.443 kelahiran hidup dari 8.555 kelahiran), Kota Kupang (8.028 kelahiran hidup dari 8.058 kelahiran) dan Kabupaten Manggarai (6.023 kelahiran hidup dari 6.107 kelahiran). Sedangkan jumlah kelahiran dan bayi lahir hidup terkecil ada di Kabupaten Sumba Barat (1.420 kelahiran hidup dari 1.438 kelahiran), Kabupaten Sabu Raijua (1.523 kelahiran hidup dari 1.558 kelahiran), dan Kabupaten Sumba Tengah (1.775 kelahiran hidup dari 1.795 kelahiran). Jika dilihat dari persentase bayi lahir hidup, Kabupaten dengan persentase terbesar adalah Kabupaten Sumba Barat Daya (99,78%), Kabupaten Alor (99,70%) dan Kabupaten Malaka (99,61%). Sedangkan Kabupaten dengan persentase bayi lahir mati tertinggi adalah Kabupaten Rote Ndao (2,18%), Kabupaten Sumba Timur (2,13%) dan Kabupaten Flores Timur (2,12%).

D. Angka Harapan Hidup

Berdasarkan data BPS Provinsi NTT tahun 2018, Usia harapan hidup sebagai indikator pembangunan kesehatan menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2016 Angka harapan hidup penduduk NTT sebesar 66,04 tahun, naik 0,08 dari keadaan tahun 2015 sebesar 65,96 tahun. Angka harapan hidup tertinggi ada di Kota Kupang (68,48 tahun), Kabupaten Sumba Tengah (67,73 tahun) dan Kabupaten Sumba Barat Daya (67,71 tahun). Sedangkan angka harapan hidup terendah ada di Kabupaten Sabu Raijua (58,69 tahun), Kabupaten Alor (60,35 tahun) dan Kabupaten Rote Ndao (63,13 tahun). Angka harapan hidup per Kabupaten/Kota selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.14. berikut

Tabel 1.14.
Angka Harapan Hidup per Kab/Kota Tahun 2013-2016

NO	KAB/KOTA	2013	2014	2015	2016
1	Sumba Barat	65,75	66,11	66,11	66,15
2	Sumba Timur	62,33	63,48	63,88	64,00
3	Kabupaten Kupang	65,94	62,97	63,17	63,33
4	Timor Tengah Selatan	67,26	65,45	65,55	65,60
5	Timor Tengah Utara	69,19	65,89	66,09	66,14
6	Belu	66,75	62,31	63,01	63,21
7	Alor	67,67	59,73	60,23	60,35
8	Lembata	66,88	65,35	65,85	66,02
9	Flores Timur	68,79	63,88	64,28	64,36
10	Sikka	69,66	65,70	66,10	66,20
11	Ende	65,31	64,27	64,37	64,42
12	Ngada	67,46	67,32	67,32	67,34
13	Manggarai	67,74	64,78	65,48	65,66
14	Rote Ndao	68,74	62,86	62,86	63,13
15	Manggarai Barat	66,84	65,98	65,98	66,19
16	Sumba Tengah	63,14	67,65	67,65	67,73
17	Sumba Barat Daya	64,20	67,08	67,08	67,71
18	Nagekeo	63,89	66,05	66,25	66,31
19	Manggarai Timur	68,19	67,27	67,27	67,36
20	Sabu Raijua	68,01	57,98	58,38	58,69
21	Malaka	66,87	64,15	64,15	64,27
22	Kota Kupang	73,46	68,14	68,34	68,48
Nusa Tenggara Timur		68,05	65,91	65,96	66,04

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

E. Status Gizi Balita

Status gizi seseorang terkait dengan permasalahan kesehatan secara umum disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperberat penyakit infeksi secara langsung juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan secara individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Prevalensi Masalah Gizi Buruk dan Kurang biasanya diukur dengan membandingkan berat badan menurut umur. Untuk kasus gizi buruk yang dialami provinsi NTT tahun 2017 serta persentase perawatannya dapat dilihat pada tabel 1.15.

Tabel 1.15. Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Kasus Balita Gizi Buruk		
		Balita Gizi Buruk	Mendapat Perawatan	% Balita yang Mendapat Perawatan
1.	Kota Kupang	279	279	100
2.	Kupang	198	198	100
3.	Timor Tengah Selatan	340	340	100
4.	Timor Tengah Utara	47	47	100
5.	Belu	64	64	100
6.	Malaka	120	120	100
7.	Alor	347	347	100
8.	Lembata	133	133	100
9.	Flores Timur	87	87	100
10.	Sikka	135	135	100
11.	Ende	76	76	100
12.	Nagekeo	8	8	100
13.	Ngada	10	10	100
14.	Manggarai Timur	94	94	100
15.	Manggarai	108	108	100
16.	Manggarai Barat	46	46	100
17.	Sumba Barat Daya	175	175	100
18.	Sumba Barat	23	23	100
19.	Sumba Tengah	66	66	100
20.	Sumba Timur	231	231	100
21.	Rote Ndao	165	165	100
22.	Sabu Raijua	286	286	100
	Jumlah/Total	3.038	3.038	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 2018

Jumlah Balita Gizi Buruk di NTT sebanyak 3.038 balita, dengan jumlah terbanyak balita gizi buruk ada di Kabupaten Alor (347 balita), Kabupaten TTS (340 balita) dan Kabupaten Sabu Raijua (286 balita). Sedangkan Kabupaten dengan jumlah balita gizi buruk terkecil ada di Kabupaten Nagekeo (8 balita), Kabupaten Ngada (10 balita) dan Kabupaten Sumba Barat (23 balita). Dari 3.038 balita gizi buruk semua sudah mendapat perawatan, atau cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan mencapai 100%.

V. KONDISI SEKTOR UNGGULAN DAN KONDISI EKONOMI

A. Potensi Unggulan Daerah

Penggerak ekonomi utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan kontribusi dari beberapa sektor unggulan daerah, diantaranya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta kehutanan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pertanian

Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Timur menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, khususnya pertanian lahan kering. Oleh karena itu, produk pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat maka dilaksanakan ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan pengembangan perbenihan/perbibitan serta didukung dengan sarana prasarana pertanian yang efisien dan memadai. Adapun produktivitas tanaman pangan di Provinsi NTT tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.16. Produktivitas Tanaman Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2017

Tanaman Pangan	Uraian	Tahun		Bertambah/ Berkurang
		2016	2017*)	
Padi	Luas Panen (ha)	259.270	307.988	48.718
	Produksi Gabah (ton)	924.403	1.090.822	166.419
	Produktivitas (kw/ha)	35,65	35,42	-0,23
Jagung	Luas Panen (ha)	265.318	313.150	47.832
	Produksi (Ton)	688.432	809.830	121.398
	Produktivitas (kw/ha)	25,95	25,86	-0,09
Kedelai	Luas Panen (ha)	6.711	5.006	-1.705
	Produksi (Ton)	5.834	6.303	469
	Produktivitas (kw/ha)	8,69	12,59	3,90
Kacang Tanah	Luas Panen (ha)	11.474	11.899	425
	Produksi (ton)	10.431	10.445	14,00
	Produktivitas (kw/ha)	9,09	8,78	-0,31
Kacang Hijau	Luas Panen (ha)	10.586	10.807	221
	Produksi (ton)	6.128	7.232	1.104
	Produktivitas (kw/ha)	5,79	6,69	0,90
Ubi Kayu	Luas Panen (ha)	51.336	59.226	7.890
	Produksi (ton)	618.281	823.114	204.833
	Produktivitas (kw/ha)	120,44	138,98	18,54
Ubi Jalar	Luas Panen (ha)	7.772	9.453	1.681
	Produksi (ton)	55.448	72.954	17.506
	Produktivitas (kw/ha)	71,34	77,18	5,84

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTT, 2018

Keterangan : *) Data sementara Statistik Pertanian Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan angka sementara tahun 2017 menunjukkan bahwa luas panen, produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan di tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2016, hal ini terjadi karena adanya intervensi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menuju upaya pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai selama 4 tahun (tahun 2016 – 2019).

Komoditi padi, luas panen pada tahun 2016 sebesar 259.270 ha meningkat menjadi 307.988 ha atau sebesar 18,79 persen tahun 2017 dan produksi gabah kering panen juga mengalami kenaikan dari 924.403 ton pada tahun 2016 menjadi 1.090.822 ton atau sebesar 18 persen tahun 2017.

Komoditi jagung, luas panen pada tahun 2016 sebesar 265.318 ha meningkat menjadi 313.150 ha atau sebesar 18,02 persen di tahun 2017 dan produksi jagung juga meningkat dari 688.432 ton di tahun 2016 menjadi 809.830 ton atau sebesar 17,63 persen ditahun 2017.

Peningkatan yang terjadi pada kedua komoditi ini disebabkan adanya intervensi pemerintah berupa intensifikasi, diversifikasi, perluasan areal tanam (PAT), pencetakan sawah baru, perbaikan jaringan irigasi serta adanya *carry over* dari pertanaman tahun 2016 karena terjadi pergeseran jadwal tanam pada akhir tahun atau bulan Desember tahun 2016 sehingga pertanaman baru menghasilkan atau dipanen pada bulan Maret dan April 2017.

Untuk komoditi kacang-kacangan dan umbi-umbian berdasarkan Angka Sementara tahun 2017 juga menunjukkan peningkatan jika dibanding dengan tahun 2016.

Komoditi kedelai, luas panen pada tahun 2016 sebesar 6.711 ha dan mengalami penurunan menjadi 5.006 ha atau sebesar 25,40 persen di tahun 2017 penurunan luas panen disebabkan karena terjadi pergeseran waktu tanam, dimana luas tambah tanam (LTT) kedelai untuk semua kabupaten yang mendapat alokasi pertanaman melalui Tugas Pembantuan dan APBN maupun APBN-P baru melakukan proses penanaman pada akhir bulan November dan bulan Desember tahun 2017 sehingga prediksi

panen baru dapat dilakukan pada bulan akhir bulan Pebruari dan Maret tahun 2018 sedangkan produksi kedelai pada tahun 2016 sebesar 5.834 ton meningkat menjadi 6.303 ton atau sebesar 8,04 persen di tahun 2017.

Sedangkan untuk komoditi kacang-kacangan dan umbi-umbian lainnya berdasarkan Data Angka Sementara Tahun 2017 menunjukkan peningkatan baik itu luas panen maupun produksi. Tanaman kacang tanah luas panen meningkat sebesar 3,70 persen dan produksi meningkat sebesar 0,13 persen pada 2017, Tanaman kacang hijau luas panen meningkat sebesar 2,09 persen dan produksi meningkat sebesar 18,02 persen pada tahun 2017, Tanaman ubi kayu luas panen meningkat sebesar 15,37 persen dan produksi meningkat sebesar 33,13 persen pada tahun 2017, Tanaman ubi jalar luas panen meningkat sebesar 21,63 persen dan produksi meningkat sebesar 31,57 persen.

2. Peternakan

Perkembangan populasi ternak pada tahun 2017, secara agregat terdapat 14 (empat belas) komoditi ternak yang dapat dipantau statistiknya, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 1.17 berikut.

Tabel 1.17.
Perkembangan Populasi Ternak di NTT
Tahun 2016-2017

No.	Jenis ternak	Populasi (Ekor/Tahun)		Perkembangan	
		2016	2017*)	ekor	%
1.	Sapi	984.551	1.003.752	19.201	1,95
2.	Kerbau	156.927	158.834	1.907	1,22
3.	Kuda	112.557	114.537	1.980	1,76
4.	Kambing	637.969	646.591	8.622	1,35
5.	Domba	66.884	67.787	903	1,35
6.	Babi	1.845.408	1.869.718	24.310	1,32
7.	Ayam buras	10.662.627	10.701.005	38.378	0,36
8.	Ayam pedaging	4.838.166	4.847.992	9.826	0,20
9.	Ayam petelur	201.511	202.622	1.111	0,55
10.	Itik	314.588	318.157	3.569	1,13
11.	Kelinci	3.333	3.426	93	2,79
12.	Puyuh	3.557	3.562	5	0,14
13.	Merpati	11.641	11.975	316	2,71
14.	Itik Manila	30.354	30.736	382	1,26

Sumber : Dinas Peternakan Prov. NTT 2018
Keterangan: *) Angka sementara

Berdasarkan tabel 1.17 diketahui bahwa perkembangan populasi per komoditinya cenderung menunjukkan angka positif. Kenaikan populasi tertinggi disumbangkan oleh ternak sapi dengan kenaikan sebesar 19.201 (1,95%). Peningkatan populasi ternak sapi dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan yang cukup menggembirakan untuk mewujudkan tekad Pemerintah Provinsi NTT menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai "Provinsi Ternak".

Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi terus berkomitmen meningkatkan populasi ternak dengan memberdayakan masyarakat/kelompok masyarakat melalui kegiatan peningkatan populasi dan produktifitas ternak pada daerah-daerah yang potensial, diantaranya berupa:

- a. Menyediakan 325 ekor ternak sapi (bali dan ongole) bagi 65 kelompok tani ternak (1 ekor jantan dan 4 ekor betina untuk tiap kelompok).
- b. Menyediakan 1.188 ekor ternak kambing lokal bagi 76 kelompok tani ternak.
- c. Penyediaan 715 ekor ternak Kambing peranakan ettawa bagi 65 kelompok tani ternak.
- d. Menyediakan 1.188 ekor ternak babi bagi 78 kelompok tani ternak.

Dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pemerintah Provinsi juga telah melaksanakan: 1) Pengadaan bahan obat-obatan untuk pengobatan ternak di 22 Kabupaten/Kota; 2) Pengadaan Vaksin, Obat dan Bahan Kesehatan Hewan untuk Rumah sakit Hewan UPT; 3) Monitoring Post Vaksinasi di 22 Kabupaten/Kota; 4) Pengawasan Zoonosis di RPH pada 9 Kabupaten dan 1 Kota; dan 5) Pelatihan Bedah bagi 2 orang Petugas pada Rumah Sakit Hewan UPT, termasuk pengadaan alat-alat kedokteran hewan dan peralatan rumah sakit hewan.

Untuk menjaga kesehatan daging, pembangunan peternakan didukung dengan ketersediaan 56 unit Rumah Potong Hewan (RPH), terdiri dari 54 RPH pemerintah dan 2 RPH Swasta. RPH yang adasaat ini belum mampu memberikan pelayanan masyarakat karena diperkirakan sekitar 40% lebih kegiatan pemotongan ternak tidak dilaksanakan di Rumah Potong Hewan.

3. Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan data BPS, pembangunan perikanan di NTT didukung potensi panjang garis pantai ± 5.700 Km dan luas wilayah laut mencapai ± 200.000 km², dengan potensi pendukung sektor perikanan adalah hutan mangrove seluas $\pm 51.854,83$ Ha (11 spesies), terumbu karang sebanyak ± 160 Jenis dari 17 Famili, rumah tangga perikanan tangkap tahun 2017 sebanyak 32.778 Kepala Keluarga dan perikanan budidaya sebanyak 37.954 Kepala Keluarga. Adapun produksi perikanan di Provinsi NTT Tahun 2017 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.18 berikut.

Tabel 1.18. Produksi Perikanan Tahun 2016-2017

No	Deskripsi	2016	2017
1.	Perikanan Tangkap		
	a. Jumlah tangkapan (ton)	123.765	127.879,75**
	b. Jumlah kapal penangkap ikan	32.147	32.474**
	c. Jumlah RTP	32.451	32.778**
	d. Jlh TPI /PPI (unit)	23	23
2.	Perikanan Budidaya		
	a. Luas tambak (Ha)	977,9	977,9**
	b. Luas kolam (Ha)	369	375**
	c. Produksi perikanan (ton)	1.836.869,6	1.935.026,08**
	d. Jumlah RTP (KK)	37.657	37.954**
	e. Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)	1	1
	f. Balai Benih Ikan (BBI) Lokal	16	16
3.	Perusahaan		
	a. Pengalengan ikan (unit)	1	1
	b. Perusahaan pengolahan perikanan	35	63
	c. Pembenuhan (Hatchery) (unit)	1	1
	d. Ekspor hasil perikanan (ton)	2.251	720,89

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT, 2018.

Keterangan : ** Angka Sementara

Jumlah Hasil Tangkapan pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari 123.765 Ton pada tahun 2016 menjadi 127.879,75 pada tahun 2017, hal ini disebabkan dengan adanya bantuan belanja hibah kepada masyarakat nelayan berupa kapal perikanan berukuran 3GT sebanyak 132 Unit dan perahu ketinting sebanyak 195 unit, sehingga memberikan dampak juga kepada penambahan jumlah kapal penangkap ikan dan jumlah RTP Perikanan. Pada perikanan budidaya, jumlah produksi juga mengalami peningkatan, yaitu produksi sebanyak 1.935.026,08 Ton (dominasi rumput laut dengan berat basah) pada tahun 2017 dari produksi sebanyak 1.836.869,6 Ton pada tahun 2016, hal ini disebabkan adanya perhatian khusus berupa bantuan budidaya

laut dalam hal ini rumput laut (bibit rumput laut kultur jaringan dan sarana produksinya) di 5 kabupaten (Kabupaten Kupang, Alor, Ende, Manggarai Barat dan Kabupaten Flores Timur).

Potensi Perikanan Tangkap, terdiri dari Potensi Lestari (MSY) sebanyak 388,7 Ton/Tahun, dengan jenis : (1) Ikan Pelagis (Tuna, Cakalang, Tenggiri, Layang, Selar, Kembung); (2) Ikan Demersal (Kerapu, Ekor Kuning, Kakap, Bambang, dll);(3) Komoditi Lainnya: (Lobster, Cumi-cumi, Kerang Darah, dll).

Potensi Perikanan Budi Daya, terdiri dari budidaya Laut seluas 9.795,9, Ha (Rumput Laut, Mutiara, Kerapu), potensi produksi dapat mencapai 53.727 ton/tahun; Potensi Budidaya Air Payau: 35,455 Ha(Udang dan Bandeng), dan pemanfaatannya 1.138,2 Ha dengan potensi produksi dapat mencapai 36.000 ton/tahun; Budidaya Air Tawar: Kolam 15,533 Ha. Potensi produksi mencapai 1,297 ton/tahun dan Mina Padi 85 Ha dengan potensi produksi mencapai 85 ton/tahun.

Potensi Budidaya Rumput Laut; Kabupaten yang budidaya rumput lautnya telah berkembang yaitu: Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Sumba Timur dan Kabupaten Manggarai Barat. Komunitas rumput laut unggulan yang dibudidayakan adalah *Eucheuma CoTonii*, *Eucheuma Sp*, dan Alga Merah (red algae). Luas lahan potensial untuk budidaya rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 51.870 Ha atau 5% dari garis pantai, dengan potensi produksi sebesar 250.000 ton kering/tahun. Walaupun potensi yang ada cukup besar namun lahan yang dimanfaatkan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk meningkatkan luas lahan budidaya dan produksi rumput laut melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan swasta.

Potensi Sumber Daya Garam sangat potensial di Nusa Tenggara Timur. Dalam upaya peningkatan produksi garam nasional yang telah dicanangkan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Adapun potensi dan pemanfaatan lahan garam di NTT dapat dilihat pada tabel 1.19 berikut.

Tabel 1.19.
Potensi dan Pemanfaatan Lahan Garam di NTT

NO	KABUPATEN	LUAS LAHAN (HA)			LOKASI	KET.
		POTENSI	PEMANFAATAN	GARAM GEO MEMBRAN		
1	Kupang	6,363	510	190	Oeteta, Bipolo, Merdeka	Pugar & Trap
2	TTS	150	2	25	Kualin	Pugar
3	TTU	120	40	40	Oesoko, Oepuah, Ponu	PUGAR
4	Alor	40	27	13	Muriaban, Tubbe, Alor Besar	Pugar
5	Flores Timur	50	1	17	Pledo	GEO Membran
6	Lembata	60	2	25	Omesuri, Ile Ape	Pugar
7	Ende	1,120	106	200	Wewaria, Magekapa	Pugar dan trap sistem
8	Nagekeo	1,765	315	270	Tendakinde, Batu Putih, Tonggurambang	Pugar dan trap sistem
9	Manggarai	50	45	5	Reok	Pugar
10	Sumba Timur	644	80	195	Kel. Kawangu, Watukamba, Kayuri	Pugar
11	Sabu Rajjua	100	10	10	Wuihebo, Meba	Pugar, Geo Membran
12	Rote Ndao	30	0	10	Landuleko, Oetefu	Pugar
	Jumlah	10,492	1,138	1,000		

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTT, 2018

Potensi Budidaya Mutiara tersebar di beberapa kabupaten yaitu 1) Kabupaten Kupang: Tanjung Ledo, Pulau Kambing, Tanjung Kabate, Talasa dan Tablolong; 2) Kabupaten Rote Ndao: Kecamatan Rote Barat Daya; 3) Kabupaten Alor: Desa Moru Kecamatan Alor Barat Daya; 4) Kabupaten Lembata: Teluk Wai Enga dan Lewo Lein; 5) Kabupaten Flores Timur: Teluk Konga, Teluk Lebateta, Selat Solor, Perairan Nayu Baya, Baniona; 6) Kabupaten Sikka: Labuan Ndeteh, Desa Nagepanda dan 7) Kabupaten Manggarai Barat: Tanjung Boleng dan Golo Mori. Kebijakan dan komitmen dari 8 (delapan) Provinsi Kepulauan melalui Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan telah menjadikan Draft UU Daerah Kepulauan masuk dalam Prolegnas Badan Legislasi DPR RI Tahun 2017 dan direncanakan akan ditetapkan pada tahun 2019 mendatang. Secara substantif, regulasi tersebut akan mendasari pengalihan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap Taman Nasional Laut Sawu sebagai kawasan konservasi dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hal ini akan menjadi acuan perubahan manajemen dan intervensi pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan yang signifikan pada kawasan laut sekitar yang potensial bagi peningkatan kesejahteraan petani-nelayan serta masyarakat pesisir.

4. Kehutanan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, luas kawasan hutan NTT sebesar 1.808.990 Ha. Bahwa sebagian kawasan hutan tersebut mengalami perubahan kawasan hutan akibat tata batas kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan, sehingga pada tahun 2014 ditetapkan regulasi baru Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 3911 Tahun 2014 tentang Kawasan hutan dan Konservasi perairan Provinsi NTT, seluas 1.784.751 ha. Luas kawasan hutan menurut fungsinya pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan atau sama dengan tahun 2016. Adapun luas kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 1.20 berikut.

Tabel 1.20
Luas kawasan hutan menurut fungsinya

No	Fungsi kawasan hutan	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
1	Kawasan Suaka alam/kawasan perairan	521.412	29,93	521.412	29,93
2	Hutan Lindung	684.572	39,29	684.572	39,29
3	Hutan Produksi Terbatas	169.707	9,74	169.707	9,74
4	Hutan Produksi Tetap	288.155	16,54	288.155	16,54
5	Hutan Produksi dpt dikonversi	78.494	4,51	78.494	4,51

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. NTT, 2018

Untuk menjaga kelestarian kawasan hutan, telah dilaksanakan pembangunan kehutanan berupa kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan, Pengembangan Tanaman Cendana, Uji Coba Pembuatan Agroforestry, Rehabilitasi Kawasan Hutan Mangrove, Uji Coba Stek Pucuk Jati, Pembangunan Hutan Berbasis Gender, Pengembangan Tanaman Kayu Merah, Pembuatan Sarana Penyuluhan berupa Persemaian Tanaman Kehutanan di Maupoly, Perencanaan Pengelolaan DAS dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Non Kayu dan Hasil Hutan. Hasil produksi kayu Rimba Campuran, Jati, Mahoni, Kayu Merah, Kayu Sengon, Kemiri, Gamelina dan Kapuk. Sedangkan produk non kayu yang menonjol yaitu asam, kemiri, cendana, kayu papi dan madu.

Pengembangan tanaman cendana sebagai salah satu potensi produksi kehutanan, terus dipacu sebagai bagian dari pelaksanaan tekad memulihkan keharuman cendana di Nusa Tenggara Timur. Cendana merupakan tanaman endemik yang telah berkontribusi signifikan dan merupakan komoditi unggulan bernilai tinggi bagi daerah

ini sejak jaman sebelum penjajahan sampai saat ini. Akibat kebijakan eksploitasi yang tidak terencana menyebabkan penurunan potensi sebesar 85% pada era sampai dengan tahun 1990-an. Untuk itu, dalam 1 (satu) dasawarsa terakhir Pemerintah Provinsi bertekad mengembalikan keharuman cendana di NTT. Dalam rangka mewujudkan tekad tersebut telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Cendana. Selanjutnya dari aspek perencanaan, telah disusun Master Plan dan Rencana Aksi Pengembangan dan Pelestarian Cendana. Pengembangan Cendana dilaksanakan dengan 2 cara yaitu pengembangan Hutan Tanaman Cendana (HTC) dalam kawasan hutan dan Gerakan Cendana Keluarga (GCK) pada lahan-lahan milik masyarakat. Penanaman anakan Cendana sampai tahun 2017 mencapai 3.162.670 anakan pada lahan seluas 361.786,8 ha atau meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 2.595.960 anakan (350.538,47 ha) yang tersebar di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Flores Timur, Sumba Timur, Sikka, Alor, Lembata, Ngada, Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya Sumba Barat, Manggarai, Sabu Raijua dan Belu.

Selain berbagai upaya yang sedang dilaksanakan pemerintah provinsi untuk mengembalikan keharuman cendana di Nusa Tenggara Timur, realita yang menggembirakan yakni terjadinya perubahan persepsi dan partisipasi masyarakat soal budidaya cendana. Bila beberapa waktu yang lalu masyarakat bersikap apatis, saat ini masyarakat mulai tergerak untuk membudidayakan cendana secara swadaya.

B. Indikator Ekonomi Daerah

1. Perkembangan Ekonomi Sisi Sektoral

Secara sektoral, sebagaimana dikutip dari Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Februari 2018 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2017 terutama didorong oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor jasa pendidikan yang dirinci sebagai berikut :

- a. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2017 tercatat tumbuh sebesar 4,88% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,37% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ini selain ditunjang dengan kondisi cuaca relatif lebih kondusifnya dibandingkan tahun sebelumnya, juga disertai dengan adanya upaya peningkatan luas lahan pertanian didukung dengan penyediaan jaringan irigasi, bantuan bibit dan pelatihan kepada petani, peningkatan produksi perkebunan berbasis ekspor seperti kacang mete (terutama ke Vietnam) serta pengiriman ternak sapi potong ke luar daerah sebanyak 66.574 ekor (94,03% dari target sebesar 70.800 ekor).
- b. Sektor transportasi dan pergudangan, tumbuh meningkat sebesar 7,66% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,43% (yoy). Peningkatan pertumbuhan transportasi dan pergudangan terutama didorong oleh adanya penambahan jadwal dan rute pesawat terbang di Provinsi NTT seperti Jakarta-Labuan Bajo oleh Batik Air, Kupang-Makassar oleh Garuda Indonesia, Kupang-Dili oleh Air Timor dan Kupang-Bali oleh NAM Air.
- c. Sektor jasa pendidikan, tumbuh meningkat sebesar 6,24% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,18% (yoy). Pertumbuhan jasa pendidikan meningkat seiring investasi di bidang pendidikan oleh pemerintah yang banyak dilakukan pada tahun 2016 seperti penambahan jumlah ruang kelas di sekolah menengah atas, sekolah kejuruan dan universitas/politeknik serta pembangunan pusat kursus telah selesai dikerjakan pada Desember 2016 dan mulai dipergunakan pada tahun 2017. Selain itu, ditunjang pula dengan adanya penambahan jumlah ruang kelas dan laboratorium di universitas/politeknik pada tahun 2017.
- d. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, tumbuh sebesar 4,45% (yoy) pada tahun 2017, melambat dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh 6,77% (yoy). Kondisi tersebut berlawanan dengan konsumsi rumah tangga yang tumbuh meningkat pada tahun 2017 seiring daya beli masyarakat NTT yang meningkat ditopang oleh peningkatan penghasilan di sektor pertanian dan perkebunan, upah minimum pegawai, dorongan gaji ke-13 dan ke-14 PNS serta penyaluran bantuan sosial

oleh pemerintah. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia menunjukkan terus terjaganya optimisme pelaku usaha dan konsumen di Provinsi NTT. Indikator SKDU berupa kegiatan usaha dan harga jual menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan III 2017. Terjaganya optimisme pelaku usaha dan konsumen, berdasarkan hasil liaison Bank Indonesia pada triwulan IV 2017 terutama didorong persiapan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

- e. Pertumbuhan sektor konstruksi, sepanjang 2017 mencapai 6,12% (yoy), melambat dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh sebesar 8,11% (yoy). Perlambatan sektor konstruksi terjadi seiring proyek strategis nasional telah banyak dilakukan pada tahun 2016 dan menysakan penyelesaian pada tahun 2017, sementara belum ada proyek strategis nasional baru yang mencatatkan perkembangan signifikan pada tahun 2017 seiring mayoritas masih dalam tahap pembebasan lahan dan tahap konstruksi awal.
- f. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sepanjang tahun 2017 tumbuh melambat, sementara secara triwulan IV 2017 tumbuh meningkat. Pertumbuhan tahun 2017 tercatat sebesar 13,59% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun 2016 sebesar 14,46% (yoy). Di lain sisi, peningkatan pertumbuhan pada triwulan IV 2017 tercermin dari meningkatnya pertumbuhan tamu hotel menjadi 20,15% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 6,03% (yoy).
- g. Sektor real estate, tumbuh meningkat sebesar 4,96% (yoy) pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,41% (yoy), begitu pula secara triwulan yang tumbuh meningkat sebesar 4,83% (yoy) dari triwulan sebelumnya 4,60% (yoy). Peningkatan pertumbuhan sektor real estate terutama disebabkan oleh pemenuhan target pembangunan perumahan oleh REI NTT sebanyak 3.000 unit rumah bersubsidi seperti di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Manggarai Barat dan Timor Tengah Selatan.
- h. Sektor industri pengolahan, tumbuh meningkat secara tahunan sebesar 7,36% (yoy) atau meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 4,98% (yoy). Pertumbuhan didorong terutama oleh permintaan semen yang masih sangat tinggi karena program

pembangunan proyek infrastruktur yang masih terus berjalan, seperti proyek-proyek strategis nasional di NTT.

- i. Sektor informasi dan komunikasi tercatat tumbuh melambat pada tahun 2017 sebesar 5,10% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,76% (yoy). Naiknya tarif pulsa telepon seluler ditengarai sebagai faktor penyebab melambatnya pertumbuhan sektor ini. Di lain sisi, kondisi tersebut berlawanan dengan adanya peningkatan luasan operasional jaringan 4G di Provinsi NTT pasca selesainya pengembangan jaringan telekomunikasi di tahun 2017 yang mampu mendorong konsumsi telekomunikasi oleh masyarakat.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sebesar 5,16% sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,18% masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,07%. Hal ini digambarkan pada Tabel 1.21 tentang perbandingan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur dengan Nasional periode 2010-2017.

Tabel 1.21. Laju Pertumbuhan Ekonomi di NTT dan Nasional Tahun 2013-2017

Periode	Nusa Tenggara Timur	Nasional
2013	5,56	5,78
2014	5,04	5,02
2015	5,13	4,79
2016	5,18	5,02
2017	5,16	5,07

Sumber : BPS Prov. NTT dan KPw Bank Indonesia Prov. NTT, 2018

Sesuai tabel di atas, penunjang pertumbuhan ekonomi tahun 2017 terutama ditopang oleh konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga non profit rumah tangga dan pemerintah yang seluruhnya tumbuh meningkat serta pembentukan modal tetap bruto/investasi. Sedangkan faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi antara lain net impor antar daerah dan impor luar negeri yang tumbuh meningkat. Net impor antar daerah dan impor luar negeri tumbuh meningkat masing-masing sebesar 4,39% (yoy) dan 314,99% (yoy) dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,28% (yoy) dan 5,91% (yoy). Peningkatan net impor antar daerah dan impor luar negeri terjadi karena meningkatnya investasi dan konsumsi di Provinsi NTT sehingga memerlukan peningkatan barang dan jasa yang perlu didatangkan dari

daerah lain di dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, adanya impor pesawat terbang pada November 2017 oleh salah satu maskapai yang beroperasi di Provinsi NTT turut menjadi penyumbang signifikan impor pada tahun 2017.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan data BPS Provinsi NTT, PDRB Provinsi NTT selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.22.
PDRB NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHB (milyard Rp.)	61.325,3	68.500,4	76.190,9	84.172,6	91.160
PDRB ADHK Tahun 2010 (milyard Rp.)	51.505,2	54.108,0	56.831,9	59.775,7	62.788
PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)	11,27	13,60	14,88	16,18	-
PDRB Perkapita ADHK (Juta Rp.)	12,40	13,60	14,88	16,18	-

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Total PDRB Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 berdasarkan harga berlaku telah mencapai 91,16,17 triliun rupiah, atau mencapai 62,79 triliun rupiah jika berdasarkan harga konstan 2010. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku juga terus meningkat dari sebesar 14,48 juta rupiah pada tahun 2015 menjadi 16,18 juta rupiah pada tahun 2016.

4. Inflasi

Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT (KEKR NTT, Februari 2018), Inflasi sepanjang tahun 2017 di Provinsi NTT mencapai 2,00% (yoy) dan menjadi inflasi terendah dalam 17 tahun terakhir. Terkendalnya harga bahan makanan terutama sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan menjadi penyebab utama rendahnya inflasi di tahun 2017. Walaupun secara bulanan, inflasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada dua bulan menjelang akhir tahun, namun besar kenaikan inflasi tidak sebesar tahun sebelumnya, sehingga secara tahunan inflasi relatif terjaga. Adanya koordinasi dan pemantauan pasokan beberapa komoditas sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan berhasil menurunkan harga beberapa komoditas sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan. Operasi pasar yang rutin dilakukan oleh PT BULOG juga mampu menahan kenaikan komoditas beras yang mulai meningkat seiring dengan turunnya pasokan secara nasional.

Pada akhir tahun 2017, pertama kalinya inflasi bahan makanan mengalami deflasi pada akhir tahun yang biasanya cenderung mengalami inflasi. Walaupun secara bulanan tetap mengalami inflasi pada bulan November dan Desember, namun besar kenaikan tidak lebih besar dibanding tahun sebelumnya, sehingga secara tahunan, harga beberapa komoditas justru mengalami penurunan. Berdasarkan 10 komoditas utama penyumbang inflasi, tarif listrik masih menjadi penyumbang terbesar dengan inflasi sebesar 15,56% (yoy), disusul kenaikan tarif perguruan tinggi, angkutan udara, biaya perpanjangan STNK dan inflasi besi beton. Inflasi tersebut lebih disebabkan oleh kenaikan tarif listrik dan biaya perpanjangan STNK oleh pemerintah, kenaikan biaya pendidikan pada perguruan tinggi di Kota Kupang, naiknya tarif angkutan udara terutama pada akhir tahun 2017 karena kenaikan permintaan, maupun peningkatan permintaan bahan bangunan seperti besi beton, seng, pasir, dan lain-lain terutama untuk memenuhi realisasi proyek di akhir tahun. Penurunan pasokan semen karena adanya prioritas bongkar bahan makanan pada akhir tahun juga menjadi penyebab kenaikan harga semen di pasar.

5. Persentase Kemiskinan

Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT (KEKR NTT, Februari 2018), perkembangan positif dimana persentase penduduk miskin NTT cenderung berada pada trend menurun sejak tahun 2015, mengikuti trend secara nasional. Hal yang menarik adalah trend penurunan presentase kemiskinan ini terjadi baik di kota maupun pedesaan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, persentase kemiskinan di kota turun tipis dari 10,17 persen menjadi 10,11 persen pada 2017. Sedangkan di pedesaan terjadi penurunan sebesar 0,6 persen dari 25,19 persen di 2016 menjadi 24,49 persen pada 2017. Secara umum menurunnya jumlah penduduk miskin pada 2017 di Provinsi NTT ini antara lain disebabkan oleh penggunaan peralatan mekanisasi yang berpengaruh terhadap turunnya biaya dan meningkatnya pendapatan petani. Inflasi yang terkendali sepanjang tahun juga berdampak terhadap terkendalinya biaya operasional rumah tangga. Namun demikian, jika dilihat dari jumlah, penduduk miskin mayoritas berada di pedesaan dengan jumlah 1,05 juta jiwa (91,4 persen) dibandingkan perkotaan yang hanya 119 ribu jiwa (8,6 persen).

Sementara itu, dari sisi ketimpangan pengeluaran, gini ratio di NTT pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,36 atau cenderung berada pada level ketimpangan menengah. Angka ini lebih baik dibandingkan dengan nasional yang sebesar 0,39. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran masyarakat di NTT cenderung lebih merata apabila dibandingkan dengan nasional. Namun demikian perlu perhatian dan upaya Pemerintah Daerah mengingat angka gini ratio ini sedikit meningkat jika dibanding 2016 sebesar 0,34.

Dari sisi garis kemiskinan, terdapat peningkatan pada bulan September 2017 sebesar 0,97 persen menjadi Rp 346.737 per kapita per bulan, dibandingkan Maret 2017 yang sebesar Rp 343.396 per kapita per bulan. Peningkatan garis kemiskinan yang diiringi oleh penurunan jumlah penduduk miskin mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat di NTT Pada September 2017. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap GK sebesar 78,83 persen. sedikit menurun dibanding periode Maret 2017 yang sebesar 79,37 persen. Hal ini menunjukkan inflasi pedesaan yang juga relatif rendah. Secara nasional, Garis Kemiskinan (GK) Provinsi NTT berada di peringkat ke-28 setelah Provinsi NTB. Provinsi dengan garis kemiskinan tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 607.927. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki GK terendah sebesar Rp 294.358 yang mengindikasikan rendahnya tingkat harga di Provinsi tersebut.

Pada sisi indikator indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) tercatat adanya kenaikan. Pada September 2017, P1 tercatat sebesar 4,16 atau turun dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 4,34. Sementara itu, angka P2 relatif stagnan pada kisaran angka 1,17. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi GK dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin tetap.

C. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya yakni lembaga perbankan dan koperasi. Eksistensi lembaga-lembaga keuangan ini memiliki peran yang sangat berarti untuk menunjang pengembangan usaha ekonomi produktif yang berbasis ekonomi kerakyatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lembaga-lembaga keuangan tersebut secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perbankan

Berdasarkan data BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017, jumlah kantor bank umum di Nusa Tenggara Timur pada akhir tahun 2016 sebanyak 476 unit. Kantor bank ini terdiri dari 1 bank pusat, 58 kantor cabang, 198 kantor cabang pembantu dan 209 kantor kas. Data terkait Jumlah Kantor Bank Menurut Status di NTT Tahun 2011–2016 dapat dilihat pada tabel 1.23. berikut

Tabel 1. 23.
Jumlah Kantor Bank Menurut Status di NTT Tahun 2011–2016

No	Status	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kantor wilayah	-	-	-	-	-	-
2.	Kantor Pusat	1	1	1	1	1	1
3.	Kantor Cabang	49	51	51	55	58	58
	a. Bank Pemth	20	20	20	20	18	18
	b. Bank Pembgn	20	22	22	20	23	23
	c. Bank Swasta	9	9	9	15	17	17
4.	Kantor Cabang Pembantu	154	172	174	173	185	198
5.	Kantor Kas	98	114	169	178	194	209
	a. Bank Pemth	70	81	90	93	85	105
	b. Bank Pemda	27	31	75	73	96	107
	c. Bank Swasta	1	2	4	12	13	7
	Total	302	338	395	407	438	476

Sumber: BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2017, 2018

2. Koperasi

Keberhasilan salah satu tekad pembangunan daerah yakni menjadikan Provinsi NTT sebagai Provinsi Koperasi. Perkembangan koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel 1.25., jumlah koperasi di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 mencapai 4.137 koperasi (3.776 Koperasi aktif dan 361 koperasi tidak aktif) atau meningkat 1,92% dari tahun sebelumnya sebesar 4.059 koperasi. Jumlah anggota koperasi sampai dengan tahun 2017 sebanyak 1.206.390 orang atau meningkat sebesar 21,00% dari tahun 2016. Tahun 2017 Koperasi yang ada di Nusa Tenggara Timur menyerap tenaga kerja sebanyak 10.935 orang terdiri dari 1.669 manajer dan 9.266 karyawan.

Data terkait perkembangan koperasi di Provinsi NTT Tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 1.24. berikut.

Tabel 1.24. PERKEMBANGAN KOPERASI TAHUN 2016 – 2017

NO	Indikator Sasaran	Tahun		Perkembangan (%)
		2016	2017	
1	Jumlah Koperasi (unit)	4.059	4.137	1,92
	- Koperasi Aktif (unit)	3.752	3.776	0,64
	- Koperasi tidak aktif (unit)	307	361	17,59
2	Jumlah Anggota	997.050	1.206.390	21,00
3	Modal :			
	- Modal Sendiri (Rp.)	2.467.119.956.653	2.364.964.742.036	(4,14)
	- Modal Luar (Rp.)	3.312.578.287.274	4.368.238.902.511	31,87
4	Nilai asset koperasi (Rp.)	5.779.698.243.927	6.621.485.322.247	14,56
5	Jumlah Koperasi yang telah melakukan RAT Unit)	2.699	1.575	(7,30)
6	Tenaga Kerja :			
	- Manajer (orang)	1.465	1.669	13,92
	- Karyawan (orang)	8.597	9.266	7,78
7	Volume Usaha saat ini (Rp)	4.562.161.630.564	5.165.814.614.110	13,23
8	Sisa Hasil Usaha (Rp)	414.015.665.153	363.970.674.792	(12,09)

Sumber: Dinas Koperasi Provinsi NTT, 2018